**JURNAL ILMIAH**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN RESORT DOMPU**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Untuk Mencapai Derajat S-1 pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**

****

**Oleh :**

**RIJALUL FIKRI**

**D1A 112 245**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2015**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN RESORT DOMPU**

****

**Oleh :**

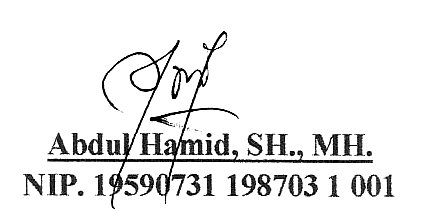
**RIJALUL FIKRI**

**D1A 112 245**

**Menyetujui,**

**Mataram,**

**Pembimbing Utama,**

****

**Abdul Hamid, SH., MH.**

**NIP. 19590731 198703 1 001**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN RESORT DOMPU**

**Rijalul Fikri**

**D1A 112 245**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Dompu dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Dompu. Penelitian ini adalah penelitian Empiris, dari hasil penelitian dapat diketahui Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Dompu adalah upaya preemtif dengan melakukan pencegahan secara dini melaluipenyuluhan, upaya preventif merupakan pencegahan oleh pihak kepolisian dengan malakukan patroli, pengawasan,dan menyelenggarakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Operasi Anti Gatarin-2015, upaya represif dengan cara membentuk dua satgas dalam Operasi Anti Gatarin-2015. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Dompu dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika disebabkan karena beberapa faktor antara lain; faktor geografis, faktor keterbatasan dana operasional, faktor masyarakat dan faktor penegak hukum

Kata Kunci :Kepolisian,Penanggulangan, Tindak Pidana,dan Narkotika.

**DRUGS CRIME ERADICATION EFFORTS BY POLICE RESORT DOMPU**

Abstrac

The aims of this research to find out drugs crime eradication effort by Police Resort Dompu and the difficulties they meet by Police resort Dompu on drugs crime eradication effort by Police Resort Dompu on Dompu jurisdiction region. This research is empiric research, from this research, we found drugs crime eradication effort on Dompu Regency. Police Resort Dompu tried preventive effort to eradication drugs crime and with public consultation and they always doing patrol, supervision, and raid with independent Police Operation (*Operasi Kepolisian Mandiri*) with code operation *Anti Gatarin 2015,* repressive effort they did with makes two division on Anti Gatarin Operation 2015.The difficultiesPolice Resort Dompu found when they tried eradicate drugs crime as follows a few factor: geography factors, financial factors, society factors, law officers factors.

Key words : Police, eradication, crime and drugs.

1. **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara hukum.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.[[1]](#footnote-1)

Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:[[2]](#footnote-2)

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .

Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum Kepolisi dapat bertindak preventif maupun represif. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan khususnya tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resort Dompu dapat melakukan tindakan preventif dan represif terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut.

Salahsatu kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Dompu adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama tiga tahun terakhir dari tahun 2012 terdapat 4 (empat) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 5 (lima) orang, tahun 2013 terdapat 8 (delapan) kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 11 (sebelas) orang, dan di tahun 2014 terdapat 5 (lima) kasus dengan pelaku sebanyak 6 (enam) orang, sehingga untuk tiga tahun terakhir jumlah penyalahgunaan narkotika sebanyak 17 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 22 orang. Maka dari itu perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik memilih judul tentang UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN RESORT DOMPU.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat merumuskan permasalahan yaitu; pertama, upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Dompu dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Dompu.

Tujuan dan manfaat penelitian yaitu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Dompu dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Dompu. Manfaat penelitian adalah manfaat secara akademis, teoritis maupun secara praktis. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris. Metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu sumber data bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan. Jenis data yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum meliputi : Bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Dompu.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rianto selaku Kasat Res Narkoba Polres Dompu pada tanggal 13 November 2015, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Dompu untuk menanggulangi tidak pidana narkotika di Kabupaten Dompu yaitu:[[4]](#footnote-4)

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Polres Dompu melakukan beberapa upaya penanggulangan yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, kantor Desa, maupun di Instansi Pemerintahan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum yang diberikan apabila menyalahgunakan narkotika.
2. Pemasangan slogan, spanduk-spanduk, dan pengedaran pamflet di jalan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan (DIKES). Dan mahasiswa untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat mengerti akan dampak yang ditimbulkan oleh narkotika.
4. Upaya Preventif

Upaya preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Dompu meliputi :

1. Melakukan patroli, pengawasan dan rajia diberbagai tempat keramaian misalnya ditempat-tempat hiburan malam, cafe-cafe, dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat terjadinya transaksi narkoba.
2. Polres Dompu beserta seluruh jajarannya dan perkuatannya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Operasi Anti Gatarin-2015 selama 30 (tiga puluh) dengan mengedepankan cara bertindak Represif dan Preemtif dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara di bentuknya 2 (dua) satgas dalam Operasi Antik Gatarin yang bertujuan :

1. Menangkap dan menindak tegas para pelaku dan seluruh jaringan sindikat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba untuk diproses tuntas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Menimbulkan efek jera bagi para pelaku
3. Menangkap otak pelaku, pembantu, pengedar/penjual peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba
4. Mengungkap dan menidak tegas semua pelaku, termaksud jaringan pelaku kejahatan narkoba
5. Menumbuhkan dan memotifasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi dampak negatif peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Bapak Sakti Natsam (Kaur Mintu Sat Res Narkoba Polres Dompu) juga menjelaskan bahwa sasaran Operasi Antik Gatarin meliputi :[[5]](#footnote-5)

1. Tempat

Meliputi; kos-kosan mahasiswa, pusat belanja, pemukimantempat hiburan malam (kafe, diskotik), terminal, tempat wisata/hiburan, hotel/tempat penginapan, sekolah/kampus, dan LAPAS.

1. Benda

Meliputi; Narkotika, Kokain, Ganja, Ectasy, Shabu-shabu (Methamphetamine), Benzodiazepin (pil, dan Magadon).

1. Orang

Meliputi; Pelajar/mahasiswa, Oknum PNS/Pejabat Pemerintahan, Pelaku bisnis/pengusaha, Pok preman pemuda pengangguran, Wisatawan domestik/mancanegara, Oknum TNI/POLRI (pengguna, pengedar dan beking bandar).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sakti Natsam selaku Kepala Urusan Administrasi dan Tatausaha Sat Res Narkona Polres Dompu pada hari selasa tanngal 17 November 2015 menjelaskan kegiatan Operasi Antik Gantarin yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu dari bulan Oktober s/d November yaitu :[[6]](#footnote-6)

1. Hari jum’at tanggal 23 Oktober 2015, Satgas 1 dan Satgas 2 OPS Antik Gantarin 2015 melaksanakan penyidikan terhadap penyedar dan pengguna narkoba yang bertempat dikelurahan Bali 1 kecematan Dompu Kabupaten Dompu dan kelurahan bada Kecematan Dompu Kabupaten dompu.
2. Hari sabtu 24 Oktober 2015 Satgas 2 OPS Antik Gantarin 2015 berhasil mengungkap kasus pengedar dan pengguna narkoba pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 pukul 20:00 Wita, bertempat di jalan baru di lingkungan Swete Barat kelurahan Bali1 Kecematan Dompu telah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang perempuan yang memiliki, menguasai, membawa narkoba golongan 1 jenis shabu, tersangka yang ditangkap adalah sebagai berikut:

* Irfani alias Iin, permpuan 23 tahun, agama islam, alamat dusun Tonda Desa Tonda Kecematan Mada Pangga Kabupaten Dompu.
* Bunga Mawarni, Perempuan 21 tahun, agama Islam, alamat Lingkungan Bali 2 Kelurahan Simpasai Kecematan Woja Kabupaten Dompu.

Dengan barang bukti sebagai berikut:

Lima(5) paket shabu seberat 1,8 gram, 1 bungkus rokok sampoerna, 1 unit sepeda motor merek Honda jenis Revo dengan Nomor Polisi EA 4909 M.

Upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan. Polisi juga sering kali mengadakan razia di kamar kost dan tempat hiburan malam yang diindikasi menjadi kantong-kantong peredaran gelap narkotika. Dalam melakukan tindakan tersebut, aparat telah melakukan upaya-upaya paksa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

1. **Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Dompu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Dompu.**

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika kepolisian Resort Dompu mengalami beberapa kendala yang disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:[[7]](#footnote-7)

* + - * 1. Faktor Geografis

Daerah Kabupaten Dompu secara geografis terdiri dari pegunungan dan perbukitan serta hutan yang cukup luas ditambah pemukiman atau perkampungan dimana daerah tersebut sulit terjangkau oleh aparat keamanan. Wilayah Kabupaten Dompu juga dikelilingi oleh lautan yang dimanfaatkan oleh para pelaku pengedar dan jaringan narkoba untuk memasok atau memasukkan narkoba, para pelaku juga menggunakan perahu-perahu kecil serta memanfaatkan adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak resmi dibuat oleh masyarakat nelayan dipesisir pantai guna dijadikan sebagai tempat masuknya barang-barang berbahaya, salah satunya narkoba agar tidak diketahui oleh aparat keamanan.

Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan seiring dengan hal tersebut munculnya tempat-tempat hiburan malam seperti cafe dan diskotik sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis illegal seperti para pelaku dan bandar narkoba maupun masyarakat umum untuk mengedarkan dan menjual narkoba dengan sasaran para pengunjung atau para wisatawan.

* + - * 1. Faktor keterbatasan dana operasional

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Jaringan peredaran narkotika yang tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan yang panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. Proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas. Bapak Sakti Natsam menambahkan selama ini dana yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan tindak pidana narkotika masih kurang, sehingga upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu dalam menanggulangi tindak pidana narkotika belum maksimal, padahal kasus tersebut sudah sangat menghawatirkan dan meresahkan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara cepat. Beliau juga menyatakan bahwa Kepolisian Resort Dompu sangat mengharapkan partisipasi dari pemerintah dari segi penyediaan dana yang lebih besar lagi guna memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehigga daerah Kabupaten Dompu dapat terbebas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.[[8]](#footnote-8)

* + - * 1. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberatasan tindak pidana narkotika. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat*”. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.[[9]](#footnote-9)

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Resor Dompu adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan terhadap pelaku dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika[[10]](#footnote-10)

* + - * 1. Faktor Penegak Hukum

Bapak Muhammad Rianto (Kasat res Narkoba) menjelaskan dalam wawancaranya terkait dengan kendala penanganan kasus tindak padana narkotika yang ada di Kabupaten Dompu dari pihak penyidik yang ada di Polres Dompu memang sudah melakukan pemberantasan dan tidak terpengaruh oleh Bandar-bandar narkoba yang ingin melakukan penyogokan melainkan kendala utamanya adalah pihak kejaksaan selalu meminta tambahan alat bikti dengan alasan kurang alat bukti dan sebagainya. Kemudian kendalanya yang lain adalah tentang penjatuhan hukuman terkadang tidak sesuai dengan pasal yang telah dicantumkan dan tidak sesuai dengan kerja keras penyidik untuk mengungkap kasus dan berjuang untuk menberantas tidak pidana narkotika yang ada di Kabupaten Dompu. Harapan yang diinginkan oleh Penyidik kasus narkoba yang ada di Kabupaten Dompu agar Jaksa dan Hakim itu membantu tugas dari Penyidik tersebut jangan sampai pelaku-pelaku kejahatan narkotika tersebut diberikan hukuman yang ringan maupun sengaja diperlambat dan berkasnya ditolak.

Dari hasil penelitian peneliti, kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Dompu dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu kurangnya dana operasional yang dimiliki oleh Polres Dompu dana yang disediakan oleh pemerintah masih kurang sehingga upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Dompu masih belum maksimal.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisa penyusun terhadap pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut, pertama upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resort Dompu yaitu, a. Upaya Preemtif adalah pencegahan yang dilakukan secara dini, melakukan penyuluhan di sekolah, kantor Desa maupun di Dinas Instansi, melakukan pemasangan slogan atau spanduk dan pamflet tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan melakukan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Kesehatan, dan mahasiswa; b. Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan patroli, pengawasan dan rajia diberbagai tempat, serta menyelenggarakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Operasi Anti Gatarin-2015 yang mengedepankan cara bertindak Represif dan Preemtif; c. Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Dompu dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara di bentuknya 2 (dua) satgas dalam Operasi Antik Gatarin, Mengadakan razia di kamar kost dan tempat hiburan malam yang diindikasi menjadi kantong-kantong peredaran gelap narkotik. Kemudian yang kedua Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Dompu dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika, dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika kepolisian Resort Dompu mengalami beberapa kendala yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu; a. Faktor Geografis, daerah Kabupaten Dompu yang terdiri dari pegunungan serta hutan yang cukup luas ditambah pemukiman atau perkampungan yang dikelilingi oleh lautan yang dimanfaatkan oleh para pelaku pengedar dan jaringan narkoba untuk memasok atau memasukan narkoba, dan Daerah Kabupaten Dompu merupakan tempat tujuan wisata di manfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menyebarkan narkoba; b. Faktor Keterbatasan Dana Operasional, dana yang dimiliki oleh Kepolisian Resort dompu masih kurang; c. Faktor Masyarakat, pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan terhadap pelaku dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika; d. Faktor Penegak Hukum, tidak adanya kesepahaman dan kerjasama yang baik antara pihak penyidik dan pihak kejaksaan (Penuntut Umum). Selanjutnya memberikan saran antara lain, pertama Pemerintah harus ikut bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan cara menyediakan dana untuk kegiatan penyuluhan maupun untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan; kedua harus ada kerja sama yang sangat intensif dari semua pihak yaitu antara pihak Kepolisian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dengan instansi Dinas Kesehatan, serta harus ada keserasian antara pihak penyidik dan penuntut umum dalam upaya penegakan hukum; kemudian yang ketiga masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Dompu. *Sosialisasi Tentang Narkoba*. Dompu, 2015.

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira, .*Dasar- dasar Filsafat dan Teori Hukum,* Bandung, Citra Aditnya Bakti, 2001

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.* LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. LN No. 2 tahun 2002 TLN No. 4168.

1. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika LN No. 143 Tahun 2009 TLN No. 5062. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia LN No.2 Tahun 2002 TLN No. 4168 [↑](#footnote-ref-2)
3. Badan Narkotika Nasioanal Kabupaten Dompu, Sosialisasi Tentang Narkotika, Tanggal 18 Februari 2015, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Dompu tanggal 13 November 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Kepala Ururan Administrasi dan Tatausaha Sat Res Narkoba Polres Dompu tanggal 17 November 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Kepala Ururan Administrasi dan Tatausaha Sat Res Narkoba Polres Dompu tanggal 17 November 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Dompu tanggal 13 November 2015 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawacara dengan Kepala Ururan Administrasi dan Tatausaha Sat Res Narkoba Polres Dompu tanggal 17 November 2015 [↑](#footnote-ref-8)
9. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, .*Dasar- dasar Filsafat dan Teori Hukum,* (Bandung:Citra Aditnya Bakti, 2001), hlm. 84 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Tatausaha Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu tanggal 17 November Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-10)